Journal of State Economic Research
Published by Yayasan Cerdas Pedia Indonesia
Volume 1 Issue 4, 2026 ISSN (Online) ***3110-3863***
Journal Homepage: **https://jurnal.smartpedia.co.id/index.php/jser**

Financial Information Technology Adoption: Ethnomethodological Study of the "SAKTI" Application

Adopsi Teknologi Informasi Keuangan: Kajian Etnometodologi Aplikasi SAKTI

Dewa Adinata
Master of Accounting at Tadulako University, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:
Dewa Adinata
✉dewaadinata3101@gmail.com

History:
Submitted: 02-04-2026
Revised: 05-05-2026
Accepted: 20-06-2026

Keyword:
Institutional Isomorphism; Ethnomethodology; Bureaucratic Reflexivity; Information Asymmetry; Green Public Administration.

Kata Kunci:
Isomorfisme Institusional; Etnometodologi; Refleksivitas Birokrasi; Asimetri Informasi; Administrasi Publik Hijau.

Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

https://doi.org/10.65101/jser.v1i4.439

Abstract

Previous studies regarding fiscal technology adoption success are often biased because they solely measure user satisfaction while ignoring the reality of institutional coercion inside mandatory government systems. This research evaluated the transmission mechanism of state financial application governance policies from operational to macro levels using an ethnomethodological framework alongside new institutional economics. Specific qualitative data collection was conducted through sequential observation stages and comprehensive interview processes involving public officials. Analysis results clearly prove that macro treasury efficiency is not driven by voluntary acceptance but formed through the indexicality of prescriptive rule interpretation and reflexivity of repetitive compliance. This strict routine successfully reduces information asymmetry while minimizing bureaucratic transaction cost burdens, which simultaneously facilitates paperless ecocracy administration. However, central server capacity failures actually distort state expenditure circulation. The novelty of this study fundamentally deconstructs linear technological determinism to propose policy reorientation from psychological evaluation toward human capital investment and decentralized infrastructure.

Abstrak

Kajian terdahulu mengenai keberhasilan adopsi teknologi fiskal sering bias karena semata mengukur kepuasan pengguna sehingga mengabaikan realitas koersi institusional pada sistem pemerintahan yang wajib. Penelitian ini mengevaluasi mekanisme transmisi kebijakan tata kelola aplikasi keuangan negara dari tingkat operasional ke makro menggunakan kerangka etnometodologi dan pendekatan ekonomi kelembagaan baru. Pengumpulan data kualitatif spesifik dilakukan lewat serangkaian tahapan observasi serta proses wawancara mendalam bersama para aparatur. Hasil analisis membuktikan bahwa efisiensi perbendaharaan makro tidak didorong oleh penerimaan sukarela, melainkan terbentuk melalui indeksikalitas pemaknaan aturan preskriptif serta refleksivitas kepatuhan repetitif. Rutinitas ketat tersebut sukses mereduksi asimetri informasi sekaligus menekan beban biaya transaksi birokrasi, yang secara bersamaan memfasilitasi perwujudan administrasi ekokrasi nirkertas. Namun, kegagalan kapasitas peladen pusat justru mendistorsi sirkulasi pengeluaran negara. Kebaruan studi ini secara fundamental mendekonstruksi determinisme teknologi linier demi mengusulkan reorientasi fokus kebijakan pemerintah dari sekadar evaluasi psikologis menuju investasi modal manusia serta penguatan infrastruktur kelembagaan publik yang jauh lebih desentralistik.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Stabilitas makroekonomi global dalam satu dekade terakhir menuntut arsitektur kebijakan fiskal yang presisi, responsif, dan transparan untuk memitigasi volatilitas pasar, kerentanan struktural, serta defisit anggaran. Dalam lanskap ekonomi publik kontemporer, kegagalan pemerintah (*government failure*) termanifestasi melalui asimetri informasi, inefisiensi alokasi sumber daya, dan kebocoran anggaran yang mendistorsi mekanisme transmisi kebijakan fiskal.[1] Merespons ketegangan kebijakan (*clash of economic policies*) antara dorongan akselerasi penyerapan anggaran untuk menstimulus Produk Domestik Bruto (PDB) dan tuntutan akuntabilitas kelembagaan yang rigid, berbagai negara berkembang mengadopsi instrumen *Integrated Financial Management Information System* (IFMIS) sebagai basis reformasi manajemen keuangan publik.[2]

Di Indonesia, transformasi struktural tersebut diwujudkan melalui implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), sebuah platform digital berekosistem tertutup yang mewajibkan interkoneksi seluruh siklus anggaran dari tahap perencanaan hingga pelaporan pada tingkat satuan kerja.[3] Meskipun demikian, adopsi teknologi informasi keuangan ini membuka diskursus akademis fundamental, terutama terkait divergensi antara determinisme teknologi yang mengasumsikan bahwa digitalisasi secara otomatis mengeliminasi inefisiensi institusional dan realitas kelembagaan yang dibatasi oleh rasionalitas terbatas (*bounded rationality*) dari aparatur negara sebagai agen pelaksana kebijakan.[4]

Pemetaan literatur terdahulu (*state of the art*) menunjukkan dikotomi perspektif dalam mengevaluasi efektivitas sistem informasi keuangan pemerintah. Kelompok literatur pertama, yang mewakili arus utama makroekonomi, dominan menggunakan pendekatan ekonometrika agregat untuk membuktikan bahwa digitalisasi pelaporan keuangan secara signifikan menekan probabilitas korupsi, mempersempit celah diskresi

[1] Bintang Lazuardi Benteng Buana Muslim, "Studi Bibliometrik Tentang Kebijakan Fiskal Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia* 5, no. 1 (April 14, 2025): 41–53, https://doi.org/10.11594/jesi.05.01.05.
[2] Sudarto Sudarto, "Pengembangan Integrated Financial Management Information System (IFMIS) Di Indonesia," *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 4, no. 2 (September 30, 2019): 87–103, https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.127.
[3] Ahmad Inzil Anwar and Miftahul Hadi, "Implementasi Aplikasi Sakti Dan Span Dalam Penyusunan Laporan Keuangan," *Jurnal Informatika* 1, no. 2 (September 27, 2022): 32–55, https://doi.org/10.57094/ji.v1i2.359.
[4] Aziz Ma'sum, Heri Purwanto, and Rikky Wisnu Nugraha, "Tinjauan Literatur: Dampak Transformasi Digital Terhadap Pengambilan Keputusan Di Lembaga Pemerintahan," *Jurnal Algoritma* 22, no. 2 (November 30, 2025): 816–25, https://doi.org/10.33364/algoritma/v.22-2.3091.

fiskal, dan mengamankan likuiditas negara.[5,6,7,8] Kelompok literatur kedua, yang berbasis pada ilmu keperilakuan sistem informasi, mayoritas bersandar pada *Technology Acceptance Model* (TAM), *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT), atau *DeLone & McLean Information System Success Model* untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna dan niat penerimaan teknologi secara linier.[9,10,11] Secara spesifik, kajian-kajian mutakhir mengenai aplikasi SAKTI di Indonesia cenderung berfokus pada determinan implementasi melalui *Human-Organization-Technology (HOT) fit framework*, yang mengestimasi kausalitas antara kualitas sistem dan kinerja pengguna secara proksi administratif.[12,13,14,15]

Sintesis tematik dari literatur tersebut mengindikasikan adanya distansi analitis antara capaian agregat fiskal di tingkat makro dan mekanisme kognitif-sosiologis pengguna di tingkat mikro. Pendekatan kuantitatif eksisting memiliki keterbatasan

---

[5] Prince Chukwuneme Enwereji and Regina Stofile, "Financial Technology Adoption in Public Financial Management of South Africa: A Path Toward Digital Transformation," *Indonesian Journal of Information Systems* 8, no. 2 (February 28, 2026): 193–211, https://doi.org/10.24002/ijis.v8i2.12959.

[6] Nourhan B Mahmoud, Essam H Hamed, and Mohamed S Dwidar, "Assessing the Impact of E-Government on Control of Corruption and Government Effectiveness: Developed and Developing Countries," *Asian Economic and Financial Review* 15, no. 5 (May 30, 2025): 740–55, https://doi.org/10.55493/5002.v15i5.5391.

[7] Pengwei Jin and Ziyue Wang, "Digital Budget Supervision Governance and Local Government Fiscal Transparency," *International Review of Economics & Finance* 102 (September 2025): 104306, https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104306.

[8] Shaibu Awudu et al., "Factors Influencing Financial Transparency and Accountability in Local Government: Evidence from IFMIS Implementation in Ghana," *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* 16, no. 2 (December 1, 2024): 345–60, https://doi.org/10.17509/jaset.v16i2.74873.

[9] Ganang Ramadhan Priambodo and Aulia Fuad Rahman, "Technology Acceptance Model Dan Delone & Mclean Is Success Model, Terhadap Minat Pembelajaran E-Learning System," *Reviu Akuntansi, Keuangan, Dan Sistem Informasi* 2, no. 2 (April 1, 2023): 244–60, https://doi.org/10.21776/reaksi.2023.2.2.72.

[10] Hossein Mohammadi, "Investigating Users' Perspectives on e-Learning: An Integration of TAM and IS Success Model," *Computers in Human Behavior* 45 (April 2015): 359–74, https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.07.044.

[11] Ann Thong Lee, R Kanesaraj Ramasamy, and Anusuyah Subbarao, "Understanding Psychosocial Barriers to Healthcare Technology Adoption: A Review of TAM Technology Acceptance Model and Unified Theory of Acceptance and Use of Technology and UTAUT Frameworks," *Healthcare* 13, no. 3 (January 27, 2025): 250, https://doi.org/10.3390/healthcare13030250.

[12] Sudi Harnowo, Budi Santoso, and Embun Suryani, "Determinan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI): Pendekatan Human-Organization-Technology (HOT) Fit Framework," *E-Jurnal Akuntansi* 31, no. 3 (March 25, 2021): 769–81, https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i03.p19.

[13] Christina Susanti, "Implementation of the Sakti Application for Financial Management in Higher Education Institutions," *Jurnal Akuntansi Publik Nusantara* 3, no. 1 (March 6, 2025): 8–14, https://doi.org/10.61754/juralinus.v3i1.127.

[14] Corry Margaretha Jayanti Gultom and Siti Nurwahyuningsih Harahap, "Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pemerintah," *Owner* 8, no. 1 (January 1, 2024): 300–313, https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1846.

[15] Rizki Amalia et al., "Public Value Creation through Mandatory Accounting Information System Success in the Public Sector: Evidence from Users of SAKTI, an Indonesian Government Finansial Application," *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan* 16, no. 2 (April 27, 2026): 395–429, https://doi.org/10.22219/jrak.v16i2.43810.

metodologis; instrumen kuesioner tertutup dinilai belum mampu merekam bagaimana rasionalitas, negosiasi, dan praktik keseharian aparatur negara secara intersubjektif mengonstruksi efektivitas sistem dalam operasional riil. Terlebih, dalam ekosistem birokrasi yang bersifat wajib (*mandatory*) seperti SAKTI, penggunaan indikator "niat perilaku untuk menggunakan" (*behavioral intention to use*) menjadi premis yang tidak relevan secara konseptual. Keadaan ini terjadi karena adopsi sistem tersebut merupakan manifestasi dari koersi institusional (paksaan kelembagaan), bukan preferensi rasional bebas di dalam mekanisme pasar.[16]

Berdasarkan analisis kesenjangan (*gap analysis*) tersebut, naskah ini menegaskan posisi kebaruannya (*novelty*) secara eksplisit. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mayoritas berfokus pada ekonometrika agregat atau replikasi model penerimaan teknologi linier, penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan mengintegrasikan kerangka Ekonomi Kelembagaan Baru (*New Institutional Economics*) dan Etnometodologi dalam menelusuri mekanisme transmisi mikro-ke-makro dari implementasi kebijakan keuangan negara. Kebaruan perspektif ini mengevaluasi isu makroekonomi klasik seperti kepatuhan fiskal, asimetri informasi, dan efisiensi birokrasi menggunakan pendekatan kualitatif-sosiologis. Tujuannya adalah memetakan bagaimana keteraturan sosial, indeksikalitas makna, dan refleksivitas praktik keseharian operator keuangan secara aktual membentuk fondasi akuntabilitas agregat. Pendekatan etnometodologi digunakan sebagai instrumen analitis spesifik guna membedah postulat bahwa kepatuhan fiskal agregat sejatinya merupakan akumulasi dari serangkaian tindakan klerikal aktor negara pada level mikro.

Kajian ini memiliki signifikansi bagi akademisi dan pembuat kebijakan (*policy makers*) perbendaharaan negara, mengingat keberhasilan transmisi kebijakan fiskal sangat bergantung pada *street-level bureaucrats* dalam mengeksekusi algoritma SAKTI menjadi pencairan anggaran riil. Posisi teoretis utama (*thesis statement*) yang dipertahankan dalam artikel ini adalah argumen bahwa penciptaan nilai publik dan efisiensi manajemen perbendaharaan negara tidak dideterminasi secara tunggal oleh arsitektur teknologi SAKTI, melainkan dikonstruksi secara esensial melalui indeksikalitas (pemaknaan regulasi) dan refleksivitas (praktik kerja repetitif) aktor ekonomi di tingkat

[16] Wahyu Meiranto et al., "The Mediating Role of Behavioral Intention on Factors Influencing User Behavior in the E-Government State Financial Application System at the Indonesian Ministry of Finance," *Cogent Business & Management* 11, no. 1 (December 31, 2024), https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2373341.

satuan kerja yang secara konstan mereduksi biaya transaksi birokrasi. Sebagai implikasi dari pilar argumen tersebut, penelitian ini merekomendasikan reorientasi paradigma dari pendekatan yang berpusat pada teknologi (*IT-centric policy*) menuju penguatan tata kelola infrastruktur desentralistik dan investasi modal manusia berkelanjutan, guna memastikan bahwa adopsi sistem digital terintegrasi secara fungsional dalam memelihara stabilitas makroekonomi yang solid.

2. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari urgensi untuk membedah transmisi kebijakan tata kelola keuangan dari level mikro menuju implikasi makroekonomi, kajian ini menstrukturkan rumusan masalah ke dalam dua pertanyaan analitis utama.

a. Bagaimana mekanisme indeksikalitas (*indexicality*) dan refleksivitas (*reflexivity*) mengonstruksi rasionalitas serta praktik kerja keseharian aparatur sipil negara dalam merespons adopsi aplikasi SAKTI sebagai instrumen tata kelola perbendaharaan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Tengah?
b. Bagaimana praktik etnometodologis di tingkat mikro tersebut mentransmisikan dampak struktural terhadap mitigasi asimetri informasi, reduksi biaya transaksi (*transaction costs*), dan efisiensi manajemen keuangan makro negara?

3. Metode Penelitian

Bagian ini menguraikan desain penelitian secara analitis dan operasional untuk mengevaluasi mekanisme transmisi adopsi teknologi fiskal digital. Kompleksitas tata kelola keuangan publik dinilai tidak dapat dianalisis secara komprehensif semata-mata melalui pendekatan ekonometrika deret waktu (*time-series*) agregat, melainkan memerlukan dekonstruksi sosiologis terhadap tindakan rasional aktor ekonomi pelaksana anggaran. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan kerangka epistemologis kualitatif dengan pendekatan Ekonomi Kelembagaan (*Institutional Economics*), yang dioperasionalisasikan melalui metode etnometodologi berbasis pemikiran Harold Garfinkel. Pendekatan etnometodologi diaplikasikan untuk mengurai struktur *taken-for-granted* (fakta operasional yang dianggap lumrah) dalam birokrasi ekonomi.[17]

Analisis difokuskan pada dua pilar kelembagaan: indeksikalitas (pemaknaan aturan makro dan instruksi sistem secara kontekstual oleh agen pelaksana) dan refleksivitas

[17] Anne Warfield Rawls, "Harold Garfinkel, Ethnomethodology and Workplace Studies," *Organization Studies* 29, no. 5 (May 1, 2008): 701–32, https://doi.org/10.1177/0170840608088768.

(tindakan repetitif individu yang membentuk keteraturan institusional).[18] Model ini digunakan untuk mengevaluasi ketegangan tata kelola publik, khususnya asimilasi antara determinisme algoritma dari pemerintah pusat dengan kapasitas kognitif dan infrastruktur pada tingkat satuan kerja daerah.

Untuk memenuhi asas replikasi ilmiah (*replicability*), penelitian memanfaatkan sumber data primer yang dikalibrasi silang dengan parameter makro sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi partisipatoris non-intrusif dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan entitas pengelola keuangan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Tengah. Penarikan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yang menargetkan informan pemegang otorisasi eksekusi sistem (Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Operator SAKTI).[19] Data sekunder mencakup regulasi otoritatif (PMK Nomor 171/PMK.05/2021) dan metrik indikator kinerja penyerapan anggaran. Dalam operasionalisasi kajian ini, variabel penelitian diklasifikasikan menjadi: variabel dependen berupa efisiensi dan transparansi tata kelola makro-fiskal; variabel independen berupa arsitektur algoritma SAKTI (*mandatory system*); serta variabel mediasi berupa indeksikalitas dan refleksivitas aktor institusional.

Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metodologis yang mengombinasikan observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumen pelaporan. Proses pembersihan data (*data cleaning*) kualitatif diimplementasikan melalui penapisan (*filtering*) transkripsi wawancara verbatim. Narasi informan direduksi dengan mengeksklusi fenomena *outlier* yang tidak merepresentasikan fungsi siklus akuntansi negara guna mengisolasi data substantif. Selanjutnya, teknik kategorisasi tematik (*thematic coding*) diterapkan secara ketat untuk menyandi aktivitas linguistik dan praktik kerja yang merepresentasikan manajemen kas, komitmen pendanaan, dan pelaporan, sehingga korpus data siap diestimasi ke dalam tahapan pemodelan konseptual.[20]

Teknik analisis data mengacu pada model analisis interaktif yang diintegrasikan secara iteratif dengan Teori Biaya Transaksi (*Transaction Cost Theory*) dan Teori

[18] Dhea Gabriela Br Tarigan and Virginia Nur Rahmanti, "Fraud Dalam Bingkai Theory of Planned Behavior: Studi Etnometodologi," *Reviu Akuntansi, Keuangan, Dan Sistem Informasi* 3, no. 3 (December 12, 2023): 638–48, https://doi.org/10.21776/reaksi.2024.3.3.262.
[19] Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, "Purposive Sampling Adalah: Berikut Contoh, Tujuan, Dan Rumusnya," detik, 2022, https://www.detik.com/jabar/berita/d-6212440/purposive-sampling-adalah-berikut-contoh-tujuan-dan-rumusnya.
[20] Heriyanto Heriyanto, "Thematic Analysis Sebagai Metode Menganalisa Data Untuk Penelitian Kualitatif," *Anuva* 2, no. 3 (November 22, 2018): 317–24, https://doi.org/10.14710/anuva.2.3.317-324.

Keagenan (*Principal-Agent Theory*).[21] Validasi model dipastikan melalui parameter pengujian kualitatif: uji kredibilitas (*member checking* dengan informan untuk memitigasi distorsi bias penafsiran), transferabilitas (kesejajaran konteks antara Bawaslu Sulawesi Tengah dengan lanskap satuan kerja nasional), dan dependabilitas (audit jejak operasional sistem transaksi). Kerangka interpretasi ekonomi kemudian diterapkan untuk mengevaluasi bagaimana interaksi sosiologis mikro ditransmisikan menjadi instrumen efisiensi kebijakan fiskal, mitigasi asimetri informasi, dan koreksi terhadap kegagalan pasar.

B. PEMBAHASAN

1. Indeksikalitas: Koersi Institusional dan Mitigasi Asimetri Informasi

Dalam paradigma Ekonomi Kelembagaan Baru, institusi formal seperti kebijakan digitalisasi sistem perbendaharaan negara tidak akan berdampak pada ekuilibrium pasar tanpa adanya proses internalisasi makna dari agen pelaksana di tingkat bawah.[22] Konsep indeksikalitas dalam etnometodologi merujuk pada fenomena di mana makna suatu kebijakan sangat terikat pada konteks spesifik dan interaksi historis agen.[23] Di Bawaslu Sulawesi Tengah, pemaknaan terhadap aplikasi SAKTI melampaui definisi teknisnya sebagai perangkat lunak akuntansi basis akrual. Para aparatur memaknai sistem ini sebagai instrumen regulasi yang mendikte, membatasi, dan mengarahkan ruang gerak rasionalitas ekonomi mereka.

Data empiris membuktikan proses pembentukan makna ini. Operator keuangan Bawaslu Sulawesi Tengah, Sulkhifli, menyatakan secara eksplisit bahwa "kami dibekali oleh Bawaslu RI" dan "mendapatkan sosialisasi materi dan langsung dipraktikkan". Pernyataan ini krusial dalam analisis ekonomi politik karena menegaskan berlakunya konsep Institutional *Isomorphism* (isomorfisme kelembagaan) secara koersif.[24] Pelembagaan aplikasi SAKTI pada satuan kerja daerah tidak terjadi secara organik

[21] Jongwook Kim and Joseph T. Mahoney, "Property Rights Theory, Transaction Costs Theory, and Agency Theory: An Organizational Economics Approach to Strategic Management," *Managerial and Decision Economics* 26, no. 4 (June 2005): 223–42, https://doi.org/10.1002/mde.1218.
[22] Bruna Coradini Nader Adam, João Garibaldi Almeida Viana, and Carine Dalla Valle, "Institutional Change and Endogenous Development: Theoretical Contributions," *Economies* 13, no. 6 (June 9, 2025): 165, https://doi.org/10.3390/economies13060165.
[23] Dalvir Samra-Fredericks, "Researching Everyday Practice: The Ethnomethodological Contribution," in *Cambridge Handbook of Strategy as Practice* (Cambridge University Press, 2015), 477–90, https://doi.org/10.1017/CBO9781139681032.028.
[24] Hasiun Budi and Sumarni Sumarni, "Pengaruh Isomorfisme Institusional Terhadap Praktik Tata Kelola Perusahaan Dengan Tekanan Regulasi Pada Perusahaan Publik Di Indonesia," *Sanskara Manajemen Dan Bisnis* 4, no. 02 (March 31, 2026): 378–89, https://doi.org/10.58812/smb.v4i02.780.

melalui mekanisme rasionalitas pasar bebas, melainkan melalui *coercive isomorphism* di mana otoritas fiskal pusat mewajibkan uniformitas akuntansi. Sosialisasi materialistik dari Bawaslu RI dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) bukan sekadar transfer pengetahuan teknis, melainkan proses standardisasi kepatuhan perbendaharaan negara yang deterministik. Aktor ekonomi memaknai sistem ini melalui indeksikalitas preskriptif; tanpa validasi algoritma sistem, eksekusi pencairan anggaran (*government spending*) tidak memiliki legitimasi hukum.

Temuan kualitatif ini mengonfrontasi secara langsung tesis arus utama dari kajian keperilakuan sistem informasi, seperti yang diajukan oleh Priambodo dan Rahman (2023) serta Lee, Ramasamy, dan Subbarao (2025), yang memosisikan niat penerimaan secara sukarela (*behavioral intention*) sebagai determinan adopsi teknologi.[25,26] Sebaliknya, realitas etnometodologis di Bawaslu Sulawesi Tengah beraliansi kuat dengan argumen struktural Amalia dkk. (2026), yang menegaskan bahwa kesuksesan implementasi sistem mandatory di sektor publik didorong oleh paksaan kelembagaan (*institutional coercion*) yang meniadakan opsi rasionalitas pengguna, bukan oleh evaluasi persepsi kenyamanan.[27]

Implikasi makroekonomi dari mekanisme indeksikalitas ini adalah reduksi asimetri informasi secara signifikan. Berdasarkan Teori Keagenan (*Principal Agent Theory*), pemerintah pusat bertindak sebagai Principal yang mengalokasikan anggaran, sedangkan satuan kerja di daerah berposisi sebagai Agent. Secara historis, desentralisasi fiskal rentan terhadap inefisiensi karena agen memiliki informasi asimetris terkait penggunaan kas, yang berpotensi memicu moral hazard.[28] Indeksikalitas preskriptif yang dikonstruksi oleh aplikasi SAKTI mengondisikan visibilitas tata kelola kas, sehingga Principal memiliki pengawasan serentak (*real-time visibility*) terhadap status likuiditas Agent. Ketika informan mengartikulasikan keharusan untuk "langsung dipraktikkan" sesuai prosedur,

[25] Priambodo and Aulia Fuad Rahman, "Technology Acceptance Model Dan Delone & Mclean Is Success Model, Terhadap Minat Pembelajaran E-Learning System."
[26] Lee, Ramasamy, and Subbarao, "Understanding Psychosocial Barriers to Healthcare Technology Adoption: A Review of TAM Technology Acceptance Model and Unified Theory of Acceptance and Use of Technology and UTAUT Frameworks."
[27] Rizki Amalia et al., "Public Value Creation through Mandatory Accounting Information System Success in the Public Sector: Evidence from Users of SAKTI, an Indonesian Government Finansial Application."
[28] Tri Wahyudi, Muhammad Nawawi, and Erlina Sari Pohan, "Desentralisasi Fiskal Dan Efesiensi Anggaran: Tinjauan Sistematis," *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat* 2, no. 2 (November 30, 2023): 32–49, https://doi.org/10.24246/dekat.v2i2.15509.

hal ini mengindikasikan bahwa diskresi modal manusia (*human capital*) telah disubordinasi oleh arsitektur teknologi negara.

Mekanisme mikro ini secara empiris melengkapi temuan makroekonomi dari Jin dan Wang (2025) serta Awudu dkk. (2024), yang membuktikan bahwa instrumen digital mempersempit celah diskresi fiskal.[29,30] Namun, kajian etnometodologis ini mengelevasi temuan tersebut dengan menunjukkan secara spesifik transmisi transmisi operasionalnya: celah inefisiensi tidak ditutup semata-mata oleh keberadaan perangkat lunak, melainkan melalui kepatuhan mekanis agen daerah terhadap algoritma penguncian transaksi yang didikte dari pusat. Apabila rantai transmisi operasional ini mengalami disrupsi, kelancaran likuiditas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah periferi akan tertunda, yang pada gilirannya mendistorsi injeksi stimulus fiskal (pengeluaran pemerintah/G) bagi perekonomian regional.

2. Refleksivitas: Reduksi Biaya Transaksi Melalui Algoritma Keteraturan

Keteraturan sosial yang direproduksi secara persisten melalui rutinitas penggunaan instrumen merupakan elemen sentral dalam analisis refleksivitas etnometodologi. Dalam operasionalisasi SAKTI, pengulangan tindakan membentuk algoritma mental yang selaras dengan arsitektur perbendaharaan negara. Informan Rachma Manoppo secara empiris merepresentasikan tingkat adaptasi institusional ini melalui penegasan bahwa, *"secara keseluruhan instansi langsung memakai aplikasinya"* dan *"aplikasinya sangat membantu untuk pekerjaan sehari-hari"*.

Dari perspektif makroekonomi institusional, rutinitas ini dapat dianalisis menggunakan Teori Biaya Transaksi (*Transaction Cost Economics*). Sebelum adopsi sistem IFMIS yang mengintegrasikan seluruh fungsi secara utuh (*full module*), biaya transaksi tata kelola birokrasi yang meliputi biaya pencarian informasi, biaya rekonsiliasi data sektoral, penelusuran dokumen fisik, perbaikan redundansi data, hingga latensi waktu otorisasi berada pada tingkat inefisiensi yang eksesif. Refleksivitas aktor terbukti memitigasi friksi administratif ini. Hal ini divalidasi oleh Sulkhifli yang mengonfirmasi bahwa *"modul komitmen dan pembayaran itu sepaket"*.

Narasi "sepaket" ini merepresentasikan transmisi kausalitas ekonomi yang esensial. Integrasi basis data pemasok (*supplier*), perjanjian kontrak (modul komitmen), hingga

[29] Jin and Wang, "Digital Budget Supervision Governance and Local Government Fiscal Transparency."
[30] Awudu et al., "Factors Influencing Financial Transparency and Accountability in Local Government: Evidence from IFMIS Implementation in Ghana."

pembentukan Surat Perintah Membayar (modul pembayaran) mereduksi friksi likuiditas secara signifikan. Refleksivitas pekerja dalam mematuhi prosedur terintegrasi ini memastikan tidak adanya kebocoran data di antara fase *encumbrance* (pengikatan dana) dan fase pencairan kas. Praktik repetitif ini meminimalisasi *bounded rationality* operator, karena sistem mendikte jalur pencairan anggaran secara linier dan tertutup.

Temuan ini secara empiris melengkapi analisis Anwar dan Hadi (2022), yang sebelumnya membuktikan bahwa penerapan modul terintegrasi mempercepat konsolidasi pelaporan keuangan negara.[31] Namun, kajian etnometodologis ini menajamkan analisis tersebut melalui ruang dialog akademis dengan membantah premis deterministik dari Gultom dan Harahap (2024).[32] Jika Gultom dan Harahap (2024) berargumen bahwa efisiensi laporan keuangan semata-mata dihasilkan oleh kualitas arsitektur *database* terpusat, temuan di Bawaslu Sulawesi Tengah ini membuktikan sebaliknya: eliminasi diskresi intervensi manual dan manipulasi anggaran hanya dapat diwujudkan karena rutinitas klerikal (refleksivitas) aparatur negara mematuhi algoritma "sepaket" tersebut secara ketat.

Tabel 1 menyajikan matriks evaluasi analitis mengenai mekanisme refleksivitas berbasis etnometodologi pada penggunaan spesifik SAKTI, serta mekanisme transmisinya secara langsung terhadap Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai metrik makro-fiskal utama Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tabel 1. Transmisi Praktik Etnometodologi SAKTI terhadap Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Aktivitas Refleksif Aktor Ekonomi (Praktik Keseharian)	**Intervensi Modul SAKTI Terkait**	**Mekanisme Transmisi Kebijakan Makro-Fiskal**	**Indikator IKPA yang Terdampak Secara Struktural**
Penginputan data kontrak dan kualifikasi *supplier* secara repetitif tanpa redundansi input.	Modul Komitmen	Mereduksi friksi likuiditas; mempercepat perputaran uang di sektor riil melalui kepastian termin pembayaran.	Deviasi Halaman III DIPA; Penyerapan Anggaran.

[31] Ahmad Inzil Anwar and Miftahul Hadi, "Implementasi Aplikasi Sakti Dan Span Dalam Penyusunan Laporan Keuangan."
[32] Gultom and Harahap, "Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pemerintah."

Otomatisasi integrasi SPM dan otorisasi kriptografis berjenjang melalui sistem *"sepaket"*.	Modul Pembayaran	Memitigasi *fraud* (kegagalan pasar institusional); presisi estimasi *cash management* secara harian.	Penyelesaian Tagihan; Akurasi SPM; Retur SP2D.
Pemantauan rekonsiliasi secara sinkron dengan entitas hulu (KPPN) tanpa latensi.	Modul Pelaporan & Akuntansi.	Menghilangkan asimetri informasi antara *Principal* (Kemenkeu) dan *Agent* (Satuan Kerja).	Penyampaian LPJ Bendahara; Kualitas Rekonsiliasi.

Sumber: Ekstraksi Data Empiris dan Sintesis Teori Kelembagaan, 2026.

Merujuk pada Tabel 1, rutinitas keseharian yang terstandardisasi mengonversi kepatuhan administratif di tingkat mikro menjadi instrumen stabilitas neraca makro. Ketika nilai deviasi Halaman III DIPA diminimalisasi melalui sinkronisasi modul komitmen, otoritas moneter dan fiskal memperoleh proyeksi injeksi kas ke dalam sistem perekonomian nasional dengan tingkat presisi tinggi. Akurasi ini bertindak sebagai elemen fundamental dalam perumusan instrumen moneter untuk mengatur jumlah uang beredar (M0/M1), serta mengendalikan laju ekspektasi inflasi jangka pendek di tingkat regional.

3. Ketegangan Infrastruktur dan Kegagalan Pasar Institusional

Validitas analisis institusional mengharuskan pengungkapan fakta empiris terkait kendala struktural yang membatasi operasionalisasi IFMIS secara makro. Terdapat divergensi persepsi di antara agen pelaksana terkait kendala sistem. Informan Rachma Manoppo menyatakan bahwa, *"kendala untuk aplikasi SAKTI sendiri sejauh ini minim kendala"*. Sebaliknya, Sulkhifli mengidentifikasi friksi struktural dengan menegaskan bahwa, *"kendala biasanya jaringan internet yang kurang stabil dan server karena dipakai seluruh Indonesia"*. Narasi paradoksal ini merepresentasikan ketegangan kebijakan (*policy clash*) antara rancangan perangkat lunak (*software*) yang secara teoretis diasumsikan andal, dan kapasitas infrastruktur fisik (*hardware/network bandwidth*) yang mengalami *bottleneck*.

Dalam kerangka makroekonomi, disrupsi akses server terpusat akibat lonjakan pengguna nasional secara konkuren merepresentasikan eksternalitas negatif (*negative externality*) dari sentralisasi infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Konsekuensi ekonomi dari kondisi ini mendistorsi transmisi kebijakan fiskal: *server bottleneck* mengakibatkan penundaan penyerapan anggaran secara agregat. Apabila

pencairan dana pihak ketiga atau transfer ke daerah tertunda akibat kegagalan akses jaringan nasional pada akhir tahun fiskal, injeksi pengeluaran pemerintah (G) bagi perekonomian riil akan mengalami stagnasi. Kondisi ini secara sistemik memunculkan risiko kontraksi pada proyeksi konsumsi rumah tangga (C).

Temuan empiris mengenai friksi infrastruktur ini membuka ruang dialog untuk mengkritisi asumsi determinisme teknologi yang diajukan oleh Mahmoud, Hamed, dan Dwidar (2025).[33] Jika kajian makro mereka menyimpulkan bahwa digitalisasi *e-government* secara otomatis berimplikasi pada efektivitas pemerintah, temuan kualitatif di Bawaslu Sulawesi Tengah ini justru membantah simplifikasi tersebut dan beresonansi kuat dengan tesis Enwereji dan Stofile (2026) serta Awudu dkk. (2024).[34,35] Serupa dengan patologi implementasi IFMIS di Afrika Selatan dan Ghana, integrasi sistem keuangan di Indonesia ternyata masih berbenturan dengan kesenjangan kapasitas infrastruktur fisik. Kegagalan adaptasi terhadap friksi ini membuktikan bahwa efektivitas tata kelola kas negara tidak cukup disandarkan pada keandalan perangkat lunak di pemerintah pusat semata, melainkan mensyaratkan ketahanan (*resilience*) jaringan pada tingkat lokal.

Ketahanan (*resilience*) aktor pelaksana di tingkat akar rumput pada kenyataannya memang teridentifikasi, namun bermanifestasi melalui adaptasi pasif seperti menunggu sistem kembali stabil dan menyesuaikan ritme kerja di luar jam operasional. Adaptasi pasif ini, meskipun mampu mengamankan kepatuhan prosedural secara formal, secara faktual mengindikasikan terjadinya kerugian bobot mati (*deadweight loss*) pada produktivitas birokrasi. Kehilangan jam kerja produktif akibat latensi sistem merupakan wujud nyata dari kegagalan pemerintah (*government failure*) bersifat laten yang secara perlahan menggerus efisiensi anggaran; sebuah kerugian struktural yang tidak terdeteksi oleh metrik pertumbuhan PDB konvensional maupun indikator evaluasi kepatuhan fiskal diagregasi.

[33] Mahmoud, Hamed, and Dwidar, "Assessing the Impact of E-Government on Control of Corruption and Government Effectiveness: Developed and Developing Countries."
[34] Enwereji and Stofile, "Financial Technology Adoption in Public Financial Management of South Africa: A Path Toward Digital Transformation."
[35] Awudu et al., "Factors Influencing Financial Transparency and Accountability in Local Government: Evidence from IFMIS Implementation in Ghana."

4. Kritik terhadap Determinisme Teknologi: Rekonstruksi Paradigma Evaluasi Sektor Publik

Sintesis tematik dari riset ini memfasilitasi evaluasi kritis terhadap mazhab penelitian sistem informasi arus utama. Studi-studi empiris terdahulu yang berbasis pada *Technology Acceptance Model* (TAM) dan variasinya, seperti yang diekstrapolasikan oleh Lee, Ramasamy, dan Subbarao (2025), secara berulang merumuskan konklusi deterministik bahwa "persepsi kebermanfaatan" (*perceived usefulness*) dan "persepsi kemudahan penggunaan" (*perceived ease of use*) merupakan determinan utama yang menentukan kesuksesan adopsi teknologi pelayanan masyarakat.[36]

Melalui temuan empiris etnometodologi ini, tesis psikologis-linier tersebut dapat dibantah (*refuting*) signifikansinya dalam ranah makroekonomi pemerintahan. Dalam lanskap sistem perbendaharaan monolitik dan terpusat yang dioperasikan di bawah mandat koersif (*mandatory system*), preferensi afektif atau metrik kenyamanan individu merupakan variabel yang tidak relevan secara struktural. Temuan kualitatif ini secara presisi mengonfirmasi dan memberikan landasan sosiologis bagi tesis kuantitatif mutakhir dari Amalia dkk. (2026).[37] Amalia dkk. (2026) membuktikan bahwa pada lingkungan *mandatory system* sektor publik seperti SAKTI, penciptaan nilai publik secara eksklusif diinstitusionalisasikan melalui keandalan integrasi sistem (*system reliability*), bukan melalui evaluasi kepuasan pengguna. Analisis etnometodologis dari satuan kerja di Sulawesi Tengah ini menjawab pertanyaan kausal mengenai mengapa mekanisme tersebut beroperasi: aparatur negara mengeksekusi SAKTI bukan didorong oleh kepuasan teknologi, melainkan akibat ketiadaan alternatif diskresi operasional di luar ekosistem yang diwajibkan (indeksikalitas koersif).

Berdasarkan konfrontasi teoretis tersebut, model ekonometrika untuk menguji adopsi teknologi sektor publik memerlukan rekonstruksi secara fundamental. Variabel determinisme linier (*user acceptance*) perlu disubstitusi. Koersi kelembagaan (*institutional coercion*) dan keandalan jaringan (*network resilience*) harus diposisikan sebagai prasyarat fundamental (determinan) kesuksesan sistem keuangan terpusat. Oleh karena itu, naskah ini merekomendasikan reorientasi paradigma penelitian di bidang

[36] Lee, Ramasamy, and Subbarao, "Understanding Psychosocial Barriers to Healthcare Technology Adoption: A Review of TAM Technology Acceptance Model and Unified Theory of Acceptance and Use of Technology and UTAUT Frameworks."
[37] Rizki Amalia et al., "Public Value Creation through Mandatory Accounting Information System Success in the Public Sector: Evidence from Users of SAKTI, an Indonesian Government Finansial Application."

ekonomi kelembagaan: lokus evaluasi harus ditransformasikan dari pendekatan psikologis pengguna (*user-centric evaluation*) menuju evaluasi ketahanan infrastruktur kelembagaan (*institution-centric evaluation*).

5. Diskursus Makroekonomi Global dan Ekokrasi (*Green Constitution)*

Meskipun lokus empiris dari kajian ini berpijak pada entitas Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, realitas adopsi SAKTI tidak dapat diisolasi dari prinsip-prinsip ekonomi pembangunan global dan arsitektur reformasi moneter internasional. Transmisi kebijakan digitalisasi ini berjalan paralel dengan mandat stabilitas fiskal global yang digariskan oleh institusi keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Dalam memitigasi kerentanan fiskal (*fiscal vulnerabilities*) dan mengelola portofolio utang negara berkembang, ketersediaan neraca konsolidasi operasi keuangan secara seketika (*real-time*) merupakan prasyarat fundamental.

Studi komparatif terhadap arsitektur ekonomi negara berkembang lainnya menegaskan ekuivalensi pola struktural ini. Berdasarkan temuan Shaibu Awudu et al., kerangka kerja *Ghana Integrated Financial Management Information System* (GIFMIS) secara teoretis dirancang untuk mereduksi diskresi lokal dan mengamankan akuntabilitas, namun menemui friksi berupa hambatan kultur kerja dan deviasi kapasitas infrastruktur.[38] Serupa dengan itu, analisis Prince Chukwuneme Enwereji dan Regina Stofile terkait reformasi *Government Financial Management Information System* (GFMIS) di Mesir serta adopsi *FinTech* di sektor publik Afrika Selatan mengungkap bahwa transisi akuntansi dari buku besar fisik ke peladen berbasis awan (*cloud-based server*) mengekspos kesenjangan kapasitas modal manusia birokrasi dan keterbatasan kerangka regulasi.[39] Kontras dengan hambatan implementasi tersebut, resiliensi operator SAKTI di Indonesia memanifestasikan bentuk adaptasi struktural, di mana ketimpangan infrastruktur disubstitusi oleh kepatuhan hierarkis (refleksivitas) guna memastikan fungsi eksekusi perbendaharaan tetap berjalan. Standarisasi pelaporan ini secara makroekonomi memfasilitasi pemerintah Republik Indonesia untuk mengonvergensi postur keuangannya dengan *Government Finance Statistics Manual* (GFSM 2014) secara

[38] Awudu et al., "Factors Influencing Financial Transparency and Accountability in Local Government: Evidence from IFMIS Implementation in Ghana."
[39] Enwereji and Stofile, "Financial Technology Adoption in Public Financial Management of South Africa: A Path Toward Digital Transformation."

presisi, yang berkontribusi pada peningkatan *sovereign credit rating* serta efisiensi suku bunga utang pemerintah di pasar finansial global.[40]

Lebih jauh, peralihan mekanis pengelolaan keuangan ke ekosistem terintegrasi berbasis modul penuh yang sepenuhnya nirkertas (*paperless*) memberikan implikasi strategis terhadap kerangka Keberlanjutan Lingkungan dan Konstitusi Hijau (*Green Economy*). Sistem pengelolaan kas konvensional yang mendahului SAKTI memerlukan tingkat konsumsi logistik yang tinggi meliputi kertas, material pencetakan berulang, dan bahan bakar untuk distribusi dokumen fisik yang memicu eksternalitas negatif terhadap ekosistem.

Diagram konseptual berikut (Gambar 1) mensintesiskan argumentasi teoretis mengenai rantai transmisi ekokrasi dan akuntabilitas fiskal, bergerak progresif dari tindakan mikro hingga bermuara pada kredibilitas indikator makro.

Gambar 1. Diagram Konseptual Transmisi Kebijakan: Dari Etnometodologi Aktor Mikro menuju Stabilitas Makroekonomi & Ekokrasi

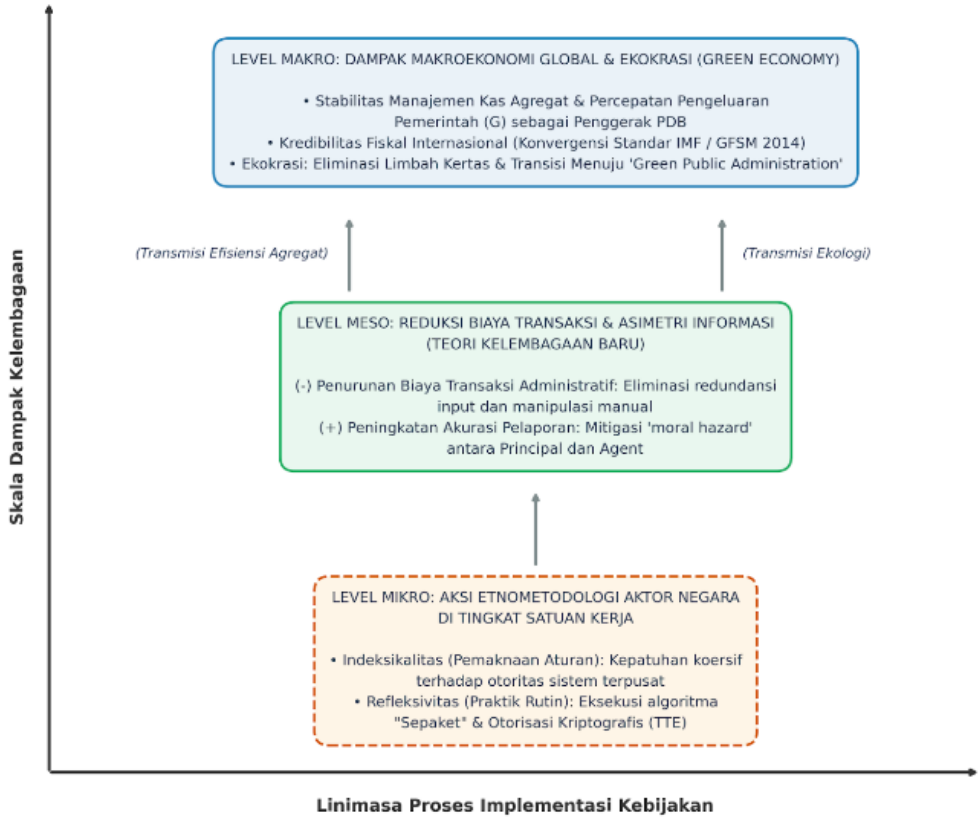

[40] Nur Istiqomah, "Analisis Implementasi Government Finance Statistics Di Indonesia: Pendekatan Teori Institusional," *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 3, no. 2 (2018): 69–90, https://itrev.kemenkeu.go.id/index.php/ITRev/article/view/66/70.

Keterangan Gambar 1: Visualisasi konseptual yang memetakan aliran kausalitas deterministik dari bawah ke-atas (*bottom-up*). Pemaknaan sistem dan tindakan repetitif pengguna di akar rumput mengeliminasi inefisiensi material dan bias manusia, yang secara berjenjang menyokong akurasi data fiskal nasional untuk mendongkrak ketahanan makroekonomi serta tata kelola pemerintahan berwawasan lingkungan.

Penjelasan empiris dari Gambar 1 menunjukkan bahwa melalui kewajiban digitalisasi anggaran yang rigid, aplikasi SAKTI memberlakukan mekanisme Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi. Transformasi nirkertas ini mengeliminasi eksploitasi jutaan lembar penggunaan kertas per tahun fiskal pada ribuan satuan kerja vertikal secara nasional. Transmisi operasional etnometodologis ini tidak sekadar menyumbang pada efisiensi ruang fiskal melalui penghematan substansial pada pos beban operasional kantor, melainkan secara struktural meletakkan fondasi perbendaharaan berbasis ekonomi hijau. Kapasitas sistem terintegrasi ini juga memfasilitasi arsitektur *budget tagging* untuk mitigasi perubahan iklim (*climate change*) secara spasial, menghadirkan transparansi bagi tata kelola pendanaan obligasi berwawasan lingkungan (*Green Sukuk*) di pasar modal.

Dekonstruksi analitis melalui lensa hibrida Ekonomi Kelembagaan Baru dan Etnometodologi mengonfirmasi bahwa utilitas aplikasi SAKTI tidak lahir dari spesifikasi teknis semata, melainkan dari persinggungan antara algoritma pusat dan kapasitas adaptif aktor lokal. Indeksikalitas berhasil mengurai asimetri informasi antara pemerintah pusat dan satuan kerja daerah. Pada dimensi operasional, asimilasi refleksivitas dalam memproses transaksi terbukti mereduksi ekses biaya transaksi (*transaction costs*) dan mencegah peluang *moral hazard*.

Sebagai implikasi kebijakan, diskursus akademis perlu beralih dari evaluasi keperilakuan pengguna menuju urgensi eskalasi keandalan kapasitas peladen terpusat. Ketika disrupsi akses peladen (*server bottleneck*) mendisrupsi konduktivitas jaringan nasional, kerugian ekonomi makro (*macroeconomic deadweight loss*) yang ditimbulkannya membebani perputaran likuiditas sektor riil dan menunda stimulus PDB. Oleh karena itu, ekspansi anggaran untuk modernisasi infrastruktur pangkalan data yang terdesentralisasi, dipadukan dengan investasi modal manusia secara masif pada *street-level bureaucrats*, merupakan prasyarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi perlindungan stabilitas makroekonomi dan pemeliharaan kredibilitas fiskal nasional di hadapan pasar

finansial global, sekaligus memperkuat komitmen tata kelola administrasi publik berwawasan ekokrasi (*green public administration*).

C. KESIMPULAN

Adopsi aplikasi SAKTI pada Bawaslu Sulawesi Tengah tidak didorong oleh penerimaan teknologi secara sukarela, melainkan berakar pada koersi institusional yang membentuk indeksikalitas aparatur untuk mematuhi regulasi pusat secara preskriptif. Lebih lanjut, refleksivitas aparatur yang terwujud dalam rutinitas kepatuhan terhadap algoritma sistem secara terintegrasi terbukti mampu mereduksi biaya transaksi birokrasi dan memitigasi asimetri informasi antara pemerintah pusat sebagai prinsipal dan satuan kerja di daerah sebagai agen. Praktik etnometodologis di tingkat mikro tersebut secara struktural mentransmisikan dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi manajemen keuangan makro, stabilitas indikator fiskal, serta perwujudan tata kelola birokrasi berwawasan lingkungan atau ekokrasi. Meskipun demikian, transmisi efisiensi tata kelola ini secara faktual masih terhambat oleh disrupsi infrastruktur peladen terpusat, sehingga pemerintah perlu mereorientasi fokus kebijakannya dari evaluasi kenyamanan pengguna menuju penguatan ketahanan jaringan kelembagaan dan investasi kapasitas modal manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Inzil Anwar, and Miftahul Hadi. "Implementasi Aplikasi Sakti Dan Span Dalam Penyusunan Laporan Keuangan." *Jurnal Informatika* 1, no. 2 (September 27, 2022): 32–55. https://doi.org/10.57094/ji.v1i2.359.

Awudu, Shaibu, N Nugraha, Chairul Furqon, Maya Sari, and Ayu Khrishna Yuliawati. "Factors Influencing Financial Transparency and Accountability in Local Government: Evidence from IFMIS Implementation in Ghana." *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* 16, no. 2 (December 1, 2024): 345–60. https://doi.org/10.17509/jaset.v16i2.74873.

Br Tarigan, Dhea Gabriela, and Virginia Nur Rahmanti. "Fraud Dalam Bingkai Theory of Planned Behavior: Studi Etnometodologi." *Reviu Akuntansi, Keuangan, Dan Sistem Informasi* 3, no. 3 (December 12, 2023): 638–48. https://doi.org/10.21776/reaksi.2024.3.3.262.

Budi, Hasiun, and Sumarni Sumarni. "Pengaruh Isomorfisme Institusional Terhadap Praktik Tata Kelola Perusahaan Dengan Tekanan Regulasi Pada Perusahaan Publik Di Indonesia." *Sanskara Manajemen Dan Bisnis* 4, no. 02 (March 31, 2026): 378–89. https://doi.org/10.58812/smb.v4i02.780.

Coradini Nader Adam, Bruna, João Garibaldi Almeida Viana, and Carine Dalla Valle. "Institutional Change and Endogenous Development: Theoretical Contributions."

Economies 13, no. 6 (June 9, 2025): 165. https://doi.org/10.3390/economies13060165.

Enwereji, Prince Chukwuneme, and Regina Stofile. "Financial Technology Adoption in Public Financial Management of South Africa: A Path Toward Digital Transformation." *Indonesian Journal of Information Systems* 8, no. 2 (February 28, 2026): 193–211. https://doi.org/10.24002/ijis.v8i2.12959.

Gultom, Corry Margaretha Jayanti, and Siti Nurwahyuningsih Harahap. "Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pemerintah." *Owner* 8, no. 1 (January 1, 2024): 300–313. https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1846.

Harnowo, Sudi, Budi Santoso, and Embun Suryani. "Determinan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI): Pendekatan Human-Organization-Technology (HOT) Fit Framework." *E-Jurnal Akuntansi* 31, no. 3 (March 25, 2021): 769–81. https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i03.p19.

Heriyanto, Heriyanto. "Thematic Analysis Sebagai Metode Menganalisa Data Untuk Penelitian Kualitatif." *Anuva* 2, no. 3 (November 22, 2018): 317–24. https://doi.org/10.14710/anuva.2.3.317-324.

Istiqomah, Nur. "Analisis Implementasi Government Finance Statistics Di Indonesia: Pendekatan Teori Institusional." *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 3, no. 2 (2018): 69–90. https://itrev.kemenkeu.go.id/index.php/ITRev/article/view/66/70.

Jin, Pengwei, and Ziyue Wang. "Digital Budget Supervision Governance and Local Government Fiscal Transparency." *International Review of Economics & Finance* 102 (September 2025): 104306. https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104306.

Kim, Jongwook, and Joseph T. Mahoney. "Property Rights Theory, Transaction Costs Theory, and Agency Theory: An Organizational Economics Approach to Strategic Management." *Managerial and Decision Economics* 26, no. 4 (June 2005): 223–42. https://doi.org/10.1002/mde.1218.

Lee, Ann Thong, R Kanesaraj Ramasamy, and Anusuyah Subbarao. "Understanding Psychosocial Barriers to Healthcare Technology Adoption: A Review of TAM Technology Acceptance Model and Unified Theory of Acceptance and Use of Technology and UTAUT Frameworks." *Healthcare* 13, no. 3 (January 27, 2025): 250. https://doi.org/10.3390/healthcare13030250.

Ma'sum, Aziz, Heri Purwanto, and Rikky Wisnu Nugraha. "Tinjauan Literatur: Dampak Transformasi Digital Terhadap Pengambilan Keputusan Di Lembaga Pemerintahan." *Jurnal Algoritma* 22, no. 2 (November 30, 2025): 816–25. https://doi.org/10.33364/algoritma/v.22-2.3091.

Mahmoud, Nourhan B, Essam H Hamed, and Mohamed S Dwidar. "Assessing the Impact of E-Government on Control of Corruption and Government Effectiveness: Developed and Developing Countries." *Asian Economic and Financial Review* 15, no. 5 (May 30, 2025): 740–55. https://doi.org/10.55493/5002.v15i5.5391.

Meiranto, Wahyu, Fortunella Farlyagiza, Faisal Faisal, Etna Nur Afri Yuyetta, and Elen Puspitasari. "The Mediating Role of Behavioral Intention on Factors Influencing User

Behavior in the E-Government State Financial Application System at the Indonesian Ministry of Finance." *Cogent Business & Management* 11, no. 1 (December 31, 2024). https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2373341.

Mohammadi, Hossein. "Investigating Users' Perspectives on e-Learning: An Integration of TAM and IS Success Model." *Computers in Human Behavior* 45 (April 2015): 359–74. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.07.044.

Muslim, Bintang Lazuardi Benteng Buana. "Studi Bibliometrik Tentang Kebijakan Fiskal Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia* 5, no. 1 (April 14, 2025): 41–53. https://doi.org/10.11594/jesi.05.01.05.

Priambodo, Ganang Ramadhan, and Aulia Fuad Rahman. "Technology Acceptance Model Dan Delone & Mclean Is Success Model, Terhadap Minat Pembelajaran E-Learning System." *Reviu Akuntansi, Keuangan, Dan Sistem Informasi* 2, no. 2 (April 1, 2023): 244–60. https://doi.org/10.21776/reaksi.2023.2.2.72.

Rawls, Anne Warfield. "Harold Garfinkel, Ethnomethodology and Workplace Studies." *Organization Studies* 29, no. 5 (May 1, 2008): 701–32. https://doi.org/10.1177/0170840608088768.

Rizki Amalia, Ridwan, Fikry Karim, and Femilia Zahra. "Public Value Creation through Mandatory Accounting Information System Success in the Public Sector: Evidence from Users of SAKTI, an Indonesian Government Finansial Application." *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan* 16, no. 2 (April 27, 2026): 395–429. https://doi.org/10.22219/jrak.v16i2.43810.

Samra-Fredericks, Dalvir. "Researching Everyday Practice: The Ethnomethodological Contribution." In *Cambridge Handbook of Strategy as Practice*, 477–90. Cambridge University Press, 2015. https://doi.org/10.1017/CBO9781139681032.028.

Sitanggang, Debora Danisa Kurniasih Perdana. "Purposive Sampling Adalah: Berikut Contoh, Tujuan, Dan Rumusnya." detik, 2022. https://www.detik.com/jabar/berita/d-6212440/purposive-sampling-adalah-berikut-contoh-tujuan-dan-rumusnya.

Sudarto, Sudarto. "Pengembangan Integrated Financial Management Information System (IFMIS) Di Indonesia." *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 4, no. 2 (September 30, 2019): 87–103. https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.127.

Susanti, Christina. "Implementation of the Sakti Application for Financial Management in Higher Education Institutions." *Jurnal Akuntansi Publik Nusantara* 3, no. 1 (March 6, 2025): 8–14. https://doi.org/10.61754/juralinus.v3i1.127.

Wahyudi, Tri, Muhammad Nawawi, and Erlina Sari Pohan. "Desentralisasi Fiskal Dan Efesiensi Anggaran: Tinjauan Sistematis." *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat* 2, no. 2 (November 30, 2023): 32–49. https://doi.org/10.24246/dekat.v2i2.15509.